

**IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN AGRARIA/KEPALA BPN
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, TERHADAP
KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH
TIMBUL (*AANSLIBING*) DI PESISIR PANTAI DESA YEH SUMBUL**

Oleh

Ni Komang Ayu Riska Pebrila, NIM 2014101015

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi dua aspek utama, yaitu (1) Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul, dan (2) Peran BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (*Aanslibbing*) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, sifat penelitian ini deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, dengan cara wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi dan diolah . (2) data sekunder data diperoleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti; (1) teknik studi dokumen (2) wawancara (3) teknik observasi (4) dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu (1) bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Agraria/Kepala Bpn Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil belum terimplementasikan dengan baik karena belum sepenuhnya dari faktor penegakan hukum dimana kurang tegasnya dan konsisten penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa, hal ini menjadikan penanganan kasus yang lamban, berbelit-belit dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, faktor sarana, faktor masyarakat. (2) bahwa upaya Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai mediator, dan membantu mengurus pengajuan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dengan cara melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi tanah.

Kata Kunci: Tanah Timbul, BPN, Kepastian Hukum.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 15 OF THE AGRARIAN
REGULATION/CHAIR OF BPN NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING
LAND ARRANGEMENT IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS,
REGARDING LEGAL SECURITY OF LEGAL OWNERSHIP RIGHTS TO
EARLY LAND (AANSLIBING) ON THE COASTAL BEACH OF YEH
SUMBUL VILLAGE**

By

Ni Komang Ayu Riska Pebrila, NIM 2014101015

Law Departement

ABSTRACT

This research aims to understand, analyze and evaluate two main aspects, namely (1) Implementation of Article 15 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of BPN Number 17 of 2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Islands towards Legal Certainty of Ownership Rights to Land Arising. (Aanslibbing) on the coast of Yeh Sumbul Village, and (2) The role of BPN in resolving the issue of legal certainty of land ownership status arising (Aanslibbing) on the coast of Yeh Sumbul, Jembrana Regency. The research uses empirical juridical legal research methods, the nature of this research is descriptive. The data and data sources used in this research are (1) primary data, namely data obtained from the source, by means of interviews, observations or reports in the form of unofficial and processed documents. (2) secondary data data obtained by someone conducting research from existing sources. Data collection techniques used by researchers; (1) document study techniques (2) interviews (3) observation techniques (4) documentation. The results of the research obtained are (1) that based on article 15 of the Agrarian Regulation/Head of BPN Number 17 of 2016 concerning Land Arrangement in Coastal Areas and Small Islands it has not been implemented properly due to imperfect law enforcement factors where there is a lack of firm and consistent law enforcement In resolving disputes, this makes case handling slow, complicated and creates legal uncertainty for the community, facilities and community factors. (2) that the efforts of the National Land Agency are to act as a mediator, and assist in processing the application for a certificate of ownership of the land, by checking and measuring the location of the land.

Keywords: Land Arising, BPN, Legal Certainty